

**PERAN PEREMPUAN DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
MELALUI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) DI DUSUN GAMBANG DESA JUWANGI
BOYOLALI JAWA TENGAH**

Sari Hernawati, S.Ag., M.Pd

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini memusatkan perhatian ke sebuah dusun yang jauh dari kabupaten sehingga akses untuk ke pemerintahan kabupaten sering mengalami kendala. Dusun Gambang merupakan salah satu dusun yang berada di wilayah Kelurahan Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Secara geografis, dusun yang memiliki 9 (sembilan) RT dan 1 RW tersebut tersebut merupakan daerah yang paling utara di Kabupaten Boyolali. Bahkan, masyarakat daerah tersebut lebih mengenal Purwodadi daripada Boyolali. Hal tersebut lantaran daerah yang bertanah kapur itu berbatasan dengan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Kondisi masyarakat pun sangat plural, dari tingkat pendidikan orangtua, mata pencaharian, ragam budaya, interaksi sosial, dan kehidupan beragama. Hal menarik yang dapat ditindakkritisi di Dusun Gambang adalah adanya budaya menyekolahkan anak yang relatif statis. Informasi awal yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa di era 1990 an, masyarakat Dusun Gambang belum memiliki budaya menyekolahkan anaknya setelah lulus dari SD. Mulai tahun 2005-an, lambat laun masyarakat sudah berupaya untuk menyekolahkan anaknya sampai SMP.

Keadaan ekonomi masyarakat Dusun Gambang, Desa Juwangi masih bertumpu pada ketersediaan alam yang ada, sedangkan dusun gambang terletak di daerah pinggiran hutan, yang menjadikan lahan pertanian tidak begitu subur, karena keadaan tanah yang berkapur. Masyarakat lebih mengandalkan hasil hutan yang milik pemerintah, dengan mencari kayu bakar, daun jati dan batu-batuan yang tersedia di hutan. Perkejaan mencari kayu, daun dan batu-batuan di hutan banyak dilakukan oleh kaum perempuan, karena para kaum pria lebih banyak yang merantau keluar daerah Gambang, yang hanya pulang dalam waktu minimal satu tahun sekali.

Kaum perempuan Dusun Gambang mempunyai peran yang sangat strategis, karena kebanyakan dari mereka merupakan *single parent* dalam mengasuh dan memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, termasuk dalam pengelolaan ekonomi keluarga karena ditinggal merantau oleh suaminya. Dalam hal ini kaum perempuan memiliki peran ganda di lingkungan keluarganya.

Kata Kunci: Peran, Perempuan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 didedikasi sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, yakni mengejar ketertinggalan multi-aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang yang terdiri dari 22 bab dan 77 pasal tersebut merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. Adapun perubahan mendasar yang dicanangkan dalam undang-undang itu antara lain demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan peran secara lebih terarah dan terencana dengan baik, sehingga kepedulian masyarakat terhadap pendidikan sangat tinggi. Pendidikan tanpa dukungan dan peran serta masyarakat akan menyebabkan *malproduct* dan hanya mengejar status, bukan keahlian demi kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan dalam hal ini adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (pasal 1 butir 24 dan 25).

Peningkatan partisipasi masyarakat dimulai dari peran keluarga. Dalam hal ini, keluarga sebagai lingkungan hidup seseorang muncul sebagai lingkungan yang menguntungkan apabila keluarga dikelola sesuai dengan tatanan sistem nilai yang jelas, yaitu sistem nilai hukum umum dan agama. Pelaksanaan fungsi keluarga dilakukan secara seimbang sesuai dengan

kebutuhan individu anggota keluarga di dalam tuntutan agama dan lingkungan di mana mereka hidup. Oleh karena itu lingkungan hidup seseorang ditentukan oleh keadaan kehidupan keluarga yang sangat tergantung pada usaha setiap anggota keluarganya.

Secara sosio-psikologis, kehidupan keluarga merupakan basis kehidupan yang mestinya mempunyai kemampuan menghadirkan lingkungan sosio-psikofisikya mamadai bagi kehidupan suatu bangsa dan negara. Pencapaian kekuatan dan kesejahteraan suatu bangsa perlu diawali dan dikonsentrasikan pada pendidikan di lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari fenomena di lapangan, yakni menunjukkan ada relasi sosial yang terputus akibat tidak linearnya upaya penyelenggaraan pendidikan dengan kondisi di lapangan. Seperti di Dusun Gambang Juwangi Boyolali yang sebagian besar masyarakatnya hanya mengandalkan peran suami dalam mencari nafkah di luar kota dan meninggalkan istri untuk mengurus rumahtangga secara menyeluruh.

Realitas sosial budaya di atas menjadi sebuah relasi “penindasan” pola pikir yang menyebabkan masyarakat di Dusun Gambang Juwangi Boyolali kurang memiliki motivasi dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, persoalan tersebut menjadi topik menarik yang patut dicarikan solusinya, dan salah satunya adalah dengan melakukan penyelidikan secara lebih mendalam.

Data awal yang dihimpun dari hasil observasi diketahui bahwa Dusun Gambang memiliki 9 (sembilan) RT dan 1 (satu) RW dengan jumlah kepala keluarga 385 KK dan jumlah penduduk 1887 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 284 anak usia sekolah dari TK-PT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Anak Sekolah (TK-PT) Tahun 2009

Jenjang	Sekolah	Putus Sekolah	Tidak Melanjutkan
TK	25	-	-
SD	126	6	56
SMP	70	5	45

SMA	15	2	13
PT	2	-	-
	218	13	114

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anak yang tidak melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi menjadi persoalan yang sangat krusial. Apalagi budaya kerja luar kota bagi kamu laki-laki di Dusun Gambang Juwangi Boyolali merupakan hal yang biasa dilakukan sehingga pemikiran pendidikan anak-anaknya tiap hari bertumpu pada kaum perempuan yang berada di rumah. Sementara suami mereka bekerja buruh bangunan di luar kota yang dalam satu tahun, rata-rata pulang ke rumah 4 (empat) kali sehingga proses membangun rumah tangga khususnya dalam menyiapkan dan membekali putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan menjadi problem tersendiri.

Hal yang menjadi budaya kaum perempuan di Dusun Gambang Juwangi Boyolali adalah adanya anggapan melanjutkan pendidikan tinggi merupakan hal yang sia-sia karena hanya menghabiskan uang. Apalagi kalau anak mereka perempuan, ada kecenderungan untuk tidak melanjutkan sekolah setelah menamatkan SMP. Situasi tersebut menjadi rentan dengan adanya pernikahan dini lantaran budaya pernikahan dini di Dusun Gambang Juwangi Boyolali merupakan tradisi turun-temurun yang sampai sekarang masih berlaku di daerah tersebut.

Anggapan kaum perempuan di Dusun Gambang lebih banyak dipengaruhi persepsi mereka yang didasarkan pada kondisi empiris, bukan pada nilai-nilai agama yang mejadi tuntunan dan motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nilai agama tidak dijadikan sebagai landasan hidup, tapi seolah-olah hanya menjadi identitas belaka. Adanya peran ganda yang dilakukan oleh kaum perempuan di Dusun Gambang menjadikan mereka tidak dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah Pemahaman para perempuan di Dusun Gambang, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali memiliki akan pentingnya pendidikan bagi putra-putrinya ?
2. Bagaimanakah Pemahaman para perempuan di Dusun Gambang Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali mengenai perkembangan anak, dalam menikahkan putra-putri pada usia dini yang mengakibatkan mereka tidak melanjutkan sekola ke jenjang yang lebih tinggi ?
3. Bagaimanakah motivasi para perempuan di Dusun Gambang Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dalam mengembangkan potensi diri mereka untuk meningkatkan ekonomi keluarga secara maksimal ?
4. Bagaimanakah pengetahuan dan pemahaman para perempuan di Dusun gambang Desa Juwangi kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali dalam mengamalkan nilai-nilai agama tersebut sebagai motivasi untuk merubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik ?

C. Signifikansi Penelitian

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan, dari berbagai analisis gender, perempuan menjadi salah satu obyek kemiskinan yang diakibatkan karena faktor struktural, budaya maupun sosial. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan akses penduduk perempuan miskin pedesaan terhadap pendidikan dasar merupakan langkah strategis yang akan memberikan efek positif jangka panjang pada komunitas miskin pedesaan untuk keluar dari lingkaran problem kemiskinan di masa depan

D. Tujuan Penelitian

Kondisi dampungan yang diharapkan adalah:

1. Agar para perempuan di Dusun Gambang Juwangi Boyolali memiliki pemahaman yang holistik akan pentingnya pendidikan bagi putra-putrinya.

2. Agar para perempuan di Dusun Gambang Juwangi Boyolali memiliki pemahaman yang holistik mengenai perkembangan anak, sehingga mampu menekan pernikahan dini yang acapkali terjadi serta memberikan kesempatan pada putra-putri mereka untuk melanjutkan sekola ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Agar para perempuan di Dusun Gambang Juwangi Boyolali memiliki motivasi serta dapat mengembangkan potensi diri mereka untuk meningkatkan ekonomi keluarga secara maksimal.
4. Agar para perempuan di Dusun gambang Juwangi Boyolali memiliki pengetahuan dan pemahaman agama secara holistik, sehingga dapat mengamalkan nilai-nilai agama tersebut sebagai motivasi untuk merubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik.

II. KAJIA N TEORI

A. Peran Perempuan

Perkembangan peran perempuan dan posisi kaum perempuan sejak masa lampau hingga saat ini telah menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum pria. Perempuan memiliki kesempatan dan mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi majunya pembangunan. Penelaan kerja perempuan tidak terlepas dari sosialisasi peran perempuan yang sangat kompleks. Di samping berperan sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai pengatur rumah tangga, sebagai tenaga kerja perempuan, juga berperan sebagai anggota masyarakat dan manusia pembangunan.

Salah satu peran perempuan dalam pembangunan adalah dengan ikut berperan dalam menciptakan program-program yang mengarah kepada pemberdayaan perempuan dengan meluncurkan program diversifikasi pangan dan gizi yaitu program yang berupaya mengintensifikasi pekarangan sebagai salah satu gerakan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Dengan melihat peran tersebut para perempuan memiliki kemandirian yang kuat, sesuai pernyataan (Nasir, 2007: 2), dalam makalahnya “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Pembangunan Pertanian”, bahwa ciri-ciri perempuan yang mandiri memiliki: 1) Kompetensi diri, 2) Konsistensi, 3) Kreativitas, 4) Komitmen, 5) Adanya kendali diri.

Ada banyak hal yang bisa diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau perempuan sehingga berperan secara aktif dalam pembangunan antara lain: (1) Sosialisasi secara berkesinambungan, (2) Membangun kesepakatan pembangunan, (3) Pemberdayaan perempuan antar pemerintah dan swasta, serta masyarakat itu sendiri agar mewujudkan kesetaraan jender di segala bidang, (4) Meningkatkan akses informasi yang dapat diterima oleh kaum perempuan di segala hal, khususnya informasi pembangunan serta melibatkan dalam pengambilan keputusan (Hayunieta, 2007 : 2).

Namun, dalam berbagai pandangan salah seorang tokoh sosiologi yang bernama Ester Boserup pada tahun 1970 mengemukakan bahwa seringkali perempuan dilupakan dalam pembangunan, sejak awal tahun 1950-an proyek-proyek pembangunan telah memberikan perhatian pada perempuan dengan pendekatan kesejahteraan. Dan selama dua dasawarsa terakhir, perhatian ini mengikuti perubahan-perubahan dalam paradigma pembangunan internasional, tetapi isu-isu tertentu yang diangkat selama dasawarsa PBB untuk perempuan juga dimasukkan secara parsial.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin. Penduduk pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan

formal maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah (Supriatna, 2000:196).

Defenisi kemiskinan terbagi atas tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009:43-46).

Menurut Bank Dunia (*World Bank*, 2006), ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia :

1. Banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan AS\$1,55 per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.
2. Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.
3. Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan nasional menyembunyikan sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara garis kemiskinan AS\$1 dan AS\$2 per hari, suatu aspek kemiskinan yang luar biasa dan menentukan di Indonesia. Ada banyak teori tentang kemiskinan, namun menurut Michael

Sherraden (2006:46-54) dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang saling bertentangan dan satu kelompok teori yang tidak memihak (middle ground), yaitu teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu (behavioral), teori yang mengarah pada struktur social, dan yang satu teori mengenai budaya miskin.

Menurutnya Teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi dan capital manusia (human capital). Teori ini disajikan dalam teori ekonomi neo-klasik, yang berasumsi bahwa manusia bebas mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dengan tersedianya pilihan-pilihan. Perspektif ini sejalan dengan teori sosiologi fungsionalis, bahwa ketidak setaraan itu tidak dapat dihindari dan diinginkan adalah keniscayaan dan penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Terori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan.

Teori Struktural yang bertolak belakang dengan terori perilaku memandang bahwa hambatan-hambatan structural yang sistematis telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan, dan berkelanjutannya penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis. Variasi teori structural ini terfokus pada topic seperti ras, gender atau ketidak sinambungan geografis dalam kaitannya atau dalam ketidakterkaitannya dengan ras.

Teori budaya miskin yang dikembangkan oleh Oscar Lewis dan Edward Banfield ini mengatakan bahwa gambaran budaya kelompok kelas bawah, khususnya pada orientasi untuk masa sekarang dan tidak adanya penundaan atas kepuasan, mengekalkan kemiskinan di kalangan mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Michael Sherraden bahwa dalam berbagai bentuk, teori budaya miskin ini berakar pada politik sayap kiri (Lewis) dan politik sayap kanan (Banfield). Dari sayap kiri, perspektif ini dikenal sebagai situasi miskin, yang mengindikasikan bahwa adanya disfungsi tingkah laku ternyata merupakan adaptasi fungsional terhadap keadaan-keadaan yang sulit

(Michael Sherraden : 2006, Parsudi Suparlan : 1995). Dengan kata lain kelompok sayap kiri cenderung melihat budaya miskin sebagai sebuah akibat dari struktur social. Sebaliknya kelompok sayap kanan melihat tingkah laku dan budaya masyarakat kelas bawah yang mengakibatkan mereka menempati posisi di bawah dalam struktur social.

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam studi tentang kemiskinan, yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan subyektif. Pendekatan obyektif yaitu pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang telah ditentukan oleh pihak lain terutama para ahli yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial sesuai dengan standart kehidupan, sedangkan pendekatan subyektif adalah pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang ditentukan oleh orang miskin itu sendiri yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial dari orang miskin dibandingkan dengan orang kaya yang ada dilingkungannya. Seperti diungkapkan oleh Joseph F. Stepanek, ed. (1985) bahwa pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri.

Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan obyektif banyak ditemukan berbagai dimensi pendekatan yang digunakan oleh para ahli maupun lembaga. Seperti BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective*.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat bahwa kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Sedangkkn pendekatan pendapatan, melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Demikian pula pendekatan kemampuan dasar yang menilai bahwa kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan lainnya Pendekatan hak melihat bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

C. Peningkatan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara, maupun pemerintah pada era reformasi ini (Suyanto, 2003:17). Karena penting, pendidikan harus selalu ditumbuhkembangkan secara sistematis oleh para pengambil keputusan. Pembaruan demi pembaruan selalu diupayakan agar pendidikan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejarah membuktikan bahwa banyak negara yang miskin sumber daya alamnya tetapi rakyatnya kaya dan sejahtera karena sumber daya manusianya bermutu tinggi. Sebaliknya, banyak negara yang kaya sumber

daya alamnya tetapi rakyatnya miskin dan sengsara karena sumber daya manusianya bermutu rendah. Berdasarkan data *Educational for All* (EFA) yang diterbitkan oleh *Global Monitoring Report 2010* menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Pendidikan di Indonesia pada saat ini berada di urutan ke-65 dari 128 negara. Indonesia masih di bawah Singapura, Hongkong, dan Jepang yang lebih miskin sumber daya alamnya dibandingkan dengan Indonesia.

Mutu pendidikan adalah konsep yang kompleks karena mutu pendidikan memiliki banyak dimensi, menyangkut serangkaian proses, dan menunjukkan berbagai indikator yang harus dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, mutu pendidikan hanya bisa dijelaskan melalui berbagai perspektif atau dengan kata lain tidak bisa dijelaskan hanya dengan menggunakan satu perspektif. Menurut Hawes dan Stephens (1990) bahwa *quality* berarti: *relevance* terhadap konteks, kebutuhan sekarang dan masa depan; *efficiency* dalam tatanan standar yang bisa dijabarkan dan dioperasionalkan; dan sebagai *something special* yang berada jauh di luar harapan normal suatu sekolah.

III. METODE PENELITIAN

A. Subjek Penelitian

Subjek penelitian PAR ini adalah kelompok perempuan dan anak-anak di dusun gambang RT 26 RW 15 desa Juwangi kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, perempuan dan anak-anak yang menjadi subyek penelitian berlokasi di daerah pinggiran hutan. Aktivitas mereka hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh anak-anak dan membantu pekerjaan suami di sawah, maupun mencari kayu di hutan.

Jumlah subyek penelitian adalah ibu-ibu muda yang berusia, 20 tahun-30 berjumlah 20 orang, tahun dan ibu-ibu yang sudah berumur 31-50 tahun berjumlah 9 orang, sedangkan untuk komunitas anak-anak dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, untuk anak-anak usia TK berjumlah 8 anak-anak usia SD berjumlah 15 anak-anak usia SMP 6 anak

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam bulan), yaitu dari bulan juli sampai dengan bulan Desember 2012. Dengan di bagi dengan beberapa tahapan. Yang dibagi dengan tiga tahapan, yaitu tahapan pertama identifikasi, tahapan kedua tahapan pelaksanaan,

Tahap pertama, dilakukan pada bulan juli 2012 dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi serta *mapping* dengan lembaga, instansi dan tokoh masyarakat Dusun gambang desa juwangi, terkait tentang potensi dan faktor pengganggu (penyebab) dalam menyelenggarakan pendidikan selanjutnya adaalah tahap perencanaan program yang dilakukan pada bulan agustus sampai september 2012

Tahapa Pelaksanaan, Tahap ini dilaksanakan mulai tanggal 11 oktober sampai dengan 15 Desember 2012 memformulasikan rancangan program sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil mapping di lokasi bersama pihak-pihak terkait. pelaksanaan program sebagaimana yang telah direncanakan dan dikoordinir oleh pelaksanan program dengan melibatkan semua pihak yang terkait sesuai dengan kompetensi wilayah garapan masing-masing.

Tahap ketiga, adalah tahap FGD dan pelaporan dengan pihak yang terkait untuk mengevaluasi program dan pelaksanaan program dilakukan pada tanggal 10 desember sampai dengan 20 desember. 20 Desember 2012 persiapan dan pelaksanaan laporan akhir.

C. Metode Penelitian

Penelitian secara umum menggunakan metode PAR (participatory action research) dalam semua proses penelitian, metode ini menempatkan peneliti dan subjek peneliti dan penelitian dalam hubungan berbagi pengalaman. Belajar bersama, dan memproduksi pengetahuan melalui refleksi kritis dari pengalaman hidup keseharian. Hasil dari penelitian ini hampir selalu ditindaklanjuti dengan program aksi penanganan masalah (Kusnaka Adimiharja dan Hary Hikmat, 2003:26)

Sebagai bentuk penelitian partisipatif, peneliti tidak sekedar mengambil data dan informasi untuk kemudian dianalisis di kampus, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti bersama kelompok masyarakat yang didampingi berusaha menemukan persoalan-persoalan kelompok, membangun kesadaran, mendorong partisipasi untuk kemudian melakukan tindakan sosial yang diinginkan secara bersama-sama.

Program pemberdayaan kelompok perempuan pinggir hutan desa gambang, terkait dengan persepsi dan motivasi serta pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar ini, sesungguhnya merupakan sebuah penelitian kaji-tindak (*action Research*) yang mengadaptasi dan mengelaborasi konsep *participatory Action Research* (PAR) dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan fokus isu, dinamika sosial dan kompleksitas masalah, serta anatomi tindakan yang akan dilakukan.

Desain penelitian partisipatif dirancang dalam modus spiral, dan secara umum dilakukan melalui empat tahapan. Keempat tahapan itu adalah seperti yang disampaikan Kurt Lewin (1974) yang mengemukakan bahwa *action research* adalah proses spiral yang meliputi (1) perencanaan tindakan yang meliputi investigasi yang cermat, (2) pelaksanaan tindakan, dan (3) penemuan fakta-fakta tentang hasil dari tindakan, dan (4) penemuan makna baru dari pengalaman sosial. (Ahmad Mahmudi, Makalah 2002)

Menurut Hurt dan Lennung (1980), *action Research* secara terus menerus membantu penyelesaian problem-problem praktis, dan memperluasnya dalam kerangka ilmu pengetahuan diiringi dengan upaya memperkuat kompetensi para pelaku, yang dijalankan dengan memperhatikan situasi sosial dengan menggunakan data-data yang relevan melalui proses siklus yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman tentang proses perubahan tatanan sosial yang dijalankan dengan prinsip kerangka kerja etik

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi penelitian ini dikumpulkan berasal dari data primer maupun data sekunder, data primer digali dengan prinsip dan semangat emansipatoris, dengan makna bahwa informasi yang diperoleh lahir atas perspektif komunitas dampingan dan adanya keterlibatan komunitas dampingan dalam membangun pengetahuan dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu seluruh informan dari komunitas dampingan dalam tahap pengumpulan data diposisikan sebagai subjek penelitian, bukan objek penelitian.

Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan atau dokumen lainnya yang diperoleh dari instansi terkait seperti kelurahan dan BPS, serta sumber-sumber lain yang relevan.

Secara keseluruhan data dan informasi digali dan dieksplorasi melalui beberapa tehnik sebagai berikut:

1. Kajian literatur, kajian mengenai faktor lemahnya motivasi belajar, hak anak atas pendidikan, diskriminasi terhadap perempuan, dan bagaimana melakukan proses pemberdayaan pada kelompok *powerless* (tak berdaya) dan kelompok masyarakat marginal.
2. Survei melalui penyebaran angket, data mengenai jumlah anak putus sekolah, anak sekolah, keadaan ekonomi keluarga, dan kemampuan keluarga dalam mengakses pendidikan dasar.
3. *Focus Group Discussion* (FGD), Di dalam penelitian PAR ini, diskusi kelompok terarah ini dilakukan pada semua tahap penelitian, baik awal perencanaan penelitian, pelaksanaan maupun saat monitoring dan evaluasi (refleksi) penelitian, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan proses penelitian.
4. *Semi-structured interview* (wawancara semi terstruktur), wawancara ini berfungsi sebagai alat bantu yang melengkapi dan memperdalam data serta informasi yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya.
5. Teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*), ada banyak teknik PRA, tapi dalam pelaksanaan penelitian PAR ini akan dipilih dan

disesuaikan dengan kondisi di lapangan pada saat penelitian ini dilakukan.

6. Observasi lapangan, teknik ini diperlukan untuk mengetahui kondisi umum komunitas dampingan, seperti keadaan perkampungan, kondisi sanitasi, dan informasi lainnya.

E. Teknik Analisis Data

analisis data secara umum dilakukan secara deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: (1). reduksi data, (2). penyajian data, (3). penarikan kesimpulan/ verifikasi. (Miles, Matthew B, 1992: 20)

Ketiga alur kegiatan analisis tersebut, pada dasarnya dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian dari analisis dimana peneliti memilih tentang bagian data mana saja yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan yang analitis.

IV. TEMUAN DAN ANALISA DATA

A. Perencanaan Program

Perencanaan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi serta *mapping* dengan lembaga, instansi dan tokoh masyarakat Dusun gambang desa juwangi, terkait tentang potensi dan faktor pengganggu (penyebab) dalam menyelenggarakan pendidikan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi faktor-faktor kontekstual perempuan dusun gambang,

guna mendukung dalam merumuskan *action plan* dalam wujud rangkaian kegiatan yang terukur dan teramati. Tahapan ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli sampai 10 Agustus 2012, dengan melibatkan unsur pelaksana program, tokoh masyarakat dusun gambang, departemen sosial, kepala Desa/Kelurahan berikut perangkat terkait serta instansi terkait lainnya.

Pada pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi informasi mengenai keadaan perempuan Dusun Gambang diperoleh dari hasil penelitian pendahuluan (*preliminary research*) dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat serta warga setempat, dari informasi awal diketahui bahwa secara ekonomi keadaan komunitas ini termasuk kelompok miskin di desa Juwangi.

Pendidikan anak-anaknya tidak tamat SMP, rata-rata mereka hanya lulusan SD sebagian kecil justru tidak lulus SD, anak perempuan umumnya telah menikah pada usia muda atau dibawah umur (15-17 tahun sudah menikah)

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa perempuan di Dusun Gambang Bu Dar mengatakan pada umumnya mengalami kesulitan melanjutkan sekolah anaknya pada jenjang SMP, hal ini karena anak-anak mereka kurang bisa bersaing untuk masuk di SMP Negeri, sementara kalau bersekolah di SMP swasta biayanya tinggi. Hal inilah yang menyebabkan anak-anak ketika mulai masuk jenjang SMP terpaksa berhenti, dan tidak melanjutkan sekolah.

Selain itu juga, setelah lulus SD untuk anak perempuan tidak melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan ada keyakinan di desa Juwangi jika seorang gadis yang dipinang maka tidak boleh menolak, karena jika menolak, maka akan sulit mendapatkan jodohnya kembali.

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Biaya yang tinggi, himpitan kebutuhan sehari-hari, menjadikan orang tua di dusun Gambang tidak menyekolahkan anaknya pada jenjang sekolah lanjut SMP atau SMA, para anak-anak setelah menginjak

dewasa anak-anak mereka di minta untuk meringankan beban ekonomi dengan membantu pekerjaan orang tua di sawah, atau bekerja di kota.

Ketimpangan gender juga terjadi di Dusun Gambang, karena para orang tua di Dusun Gambang lebih memilih untuk menyekolahkan anak lelaki daripada anak perempuan, para orang tua lebih memilih anak laki-lakinya untuk melanjutkan sekolah karena mereka menganggap pada akhirnya anak perempuan hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga yang tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu ngadiman:

Cah wedok, ora perlu sekolah dhuwur-dhuwur, paling yo..engko yen wis duwe bojo, kerjone mung jero umah, ngurusi anak, sing golet duit neng jobo kuwi bocah lanang, dadi sing kudu pinter iku bocah lanang.

Setelah identifikasi selesai dilakukan sesuai informasi yang didapatkan, kemudian memformulasikan rancangan program sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil mapping di lokasi bersama pihak-pihak terkait, yang dihasilkan secara bersama-sama mengenai beberapa problematika yang di dianggap faktor penyebab (pemicu) rendahnya motivasi bersekolah dan belajar di dusun gambang, pola pendidikan, kurikulum yang diterapkan, sumber daya pendidik, metode, media pembelajaran, setting (desain) tempat pembelajaran, peserta didik, fasilitas pembelajaran, penjadwalan, dan lainnya. Tahap ini dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012.

B. Perencanaan tindakan

Sebagaimana telah diungkap dalam bagian metode dan desain penelitian, penelitian PAR ini adalah penelitian tindakan (action research). Temuan penelitian dan hasil analisisnya mengenai kapasitas komunitas ini menyangkut aksesibilitasnya terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan,

memberikan informasi yang bermakna bagi penyusunan perencanaan mengenai tindakan apa yang tepat, dan bisa dilaksanakan, agar komunitas dampingan ini mengalami penguatan (empowerment) dan meningkatkan kapasitasnya (capacity building), sehingga komunitas ini memiliki aksesibilitas yang cukup dalam memenuhi hak anak atas pendidikan dasar.

Model perencanaan penelitian PAR ini dilakukan dengan kerangka perencanaan partisipatif, yakni sebuah teknik perencanaan yang dilakukan dengan senantiasa melibatkan peran serta komunitas yang didampingi.

Pada tahap awal perencanaan, dilaksanakan *focus group discussion* (FGD) baik dengan lingkaran inti komunitas, maupun dengan *stakeholder* terkait. Tujuan dari FGD ini adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar komunitas dampingan (*need assesment*).

Dari hasil *preliminary research*, penyebaran angket, wawancara, dan refleksi awal FGD pada tanggal 21 Agustus 2012 dengan kelompok perempuan dan tokoh masyarakat Dusun Gambang diperoleh asumsi-asumsi penting dan keadaan nyata komunitas sebagai berikut:

1. Secara ekonomi komunitas ini memiliki tingkat penghasilan yang rendah (miskin), dengan tingkat pendidikan KK 70% diantaranya tidak tamat SD dan atau hanya tamat SD.
2. Tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap motivasi dan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar.
3. Tingkat ekonomi yang rendah berdampak pada kemampuan keluarga dalam menjangkau layanan pendidikan dasar juga rendah.
4. Tingkat pendidikan yang rendah, berakibat pada minimnya kesadaran dan motivasi komunitas ini untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan sesuai usia sekolah.
5. Kesadaran dan motivasi orang tua yang rendah juga berimplikasi pada rendahnya kesadaran dan motivasi anak-anak untuk bersekolah.
6. Pengaruh ekonomi yang rendah berpengaruh pada para perempuan di Dusun Gambang yang menganggap bahwa pendidikan yang lebih tinggi

hanya untuk anak laki-laki.

7. Para perempuan di Dusun Gambang banyak yang melakukan pernikahan dini (usia sangat muda) karena pandangan tabu menolak lamaran lelaki karena akan berakibat menjadi “tidak laku”
8. Para orang tua, lebih memilih menikahkan anak-anak perempuannya lebih cepat, karena akan meringankan beban keluarga yang akan ditanggung oleh suami.

FGD dengan stakeholder digelar untuk tujuan memperoleh masukan-masukan dan penyempurnaan rencana tindakan pemberdayaan. Pada tanggal 15 juli 2012 dilaksanakan FGD stakeholder diruang pertemuan kantor Fakultas Agama Islam, dengan peserta TIM PAR FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang, Pihak tokoh masyarakat Dusun Gambang Dsa Juwangi, TIM Fasilitator Lapangan (mahasiswa), LSM diantaranya Indonesia Care.

Dari FGD tersebut, dihasilkan masukan-masukan yang penting bagi penyempurnaan perencanaan tindakan yang akan dilaksanakan. Beberapa masukan penting yang berhasil dihimpun dalam FGD tersebut adalah:

1. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, oleh karenanya tanggung jawab bersama untuk membangun kesadaran berpendidikan, khususnya pendidikan dasar.
2. Perlu dibangun sinergi antar elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Adanya fakta bahwa masyarakat miskin sulit mengakses pendidikan yang berkualitas terutama ketika masuk ke jenjang SMP, perlu dipikirkan adanya kuota bagi anak dari keluarga miskin, misal 15-20% diberikan jatah masuk di SMP-SMP negeri.
4. Kemiskinan merupakan penyumbang terbesar terjadinya anak putus sekolah, oleh karena itu perlu dibuat regulasi khusus untuk keluarga miskin, semacam PERDA yang memberikan proteksi kepada keluarga miskin untuk tetap bisa memperoleh akses pendidikan dasar.
5. Masalah putus sekolah tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan biaya, tapi juga oleh kesalahan paradigma, perlu merubah paradigma masyarakat,

khususnya komunitas dampingan agar memiliki kesadaran bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan anak-anak mereka.

6. Adanya pengalaman beberapa LSM yang pernah mendampingi komunitas ini dalam program lain, disarankan perlunya dilakukan pergeseran aktor intelektual pembangunan, dengan rekomendasi agar lebih memprioritaskan kaum ibu-ibu (perempuan), perempuan lebih bisa dipercaya dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan di komunitas ini.
7. Perlunya diambil inisiatif dan prakarsa pembentukan pusat belajar masyarakat yang tidak terlalu formal, semacam sanggar baca yang dapat dijadikan wahana belajar masyarakat.
8. Program PNPM Mandiri diakui telah banyak membantu masyarakat, tapi dalam pelaksanaannya lebih dominan pada pembangunan prasarana fisik, oleh karena itu program PAR ini diharapkan bisa mengisi celah-celah program yang belum tersentuh oleh program PNPM Mandiri.
9. Pembangunan kesadaran pentingnya pendidikan hendaknya tidak saja dilakukan terhadap orang tua anak, tapi akan sangat baik jika dilakukan juga terhadap anak-anak langsung, melalui kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak-anak.
10. Menggalakan dan menghidupkan kembali prinsip-prinsip program GN-OTA dalam lingkup lokal untuk mengatasi anak putus sekolah, sehingga anak-anak yang kurang mampu memiliki orang tua asuh yang dapat menjamin terlaksananya pendidikan dasar buat mereka.
11. Anak-anak yang masih berstatus sekolah, tapi rentan diharapkan mendapatkan dampingan dari TIM PAR agar tidak sampai berhenti atau putus sekolah ditengah jalan.
12. Diperlukan kerja keras, dan kerjasama banyak pihak, dan waktu yang tidak sebentar untuk melaksanakan agenda-agenda pemberdayaan di komunitas ini.

Berdasarkan masukan-masukan, asumsi-asumsi penting di atas, juga pertimbangan keterbatasan waktu dan pendanaan, serta keadaan nyata

komunitas yang terkait dengan aksesibilitasnya terhadap pendidikan dasar, maka disusunlah sasaran umum rencana tindakan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan dengan sasaran orang tua anak (kepala keluarga)
 - a. Pendampingan KK yang memiliki anak putus sekolah.
 - b. Pengajian atau kajian mengenai pendidikan anak dalam pandangan Agama Islam.
 - c. Pendirian kelompok belajar masyarakat.
2. Program Pemberdayaan dengan sasaran anak-anak
 - a. Anak-anak yang masih sekolah
 - b. Anak-anak yang putus sekolah

E. Pelaksanaan tindakan

Sesuai dengan rencana umum tindakan yang telah disusun bersama masyarakat, berikut ini pelaksanaan tindakan pemberdayaan yang telah dilaksanakan dalam penelitian PAR:

a. Tindakan dengan Sasaran orang tua anak :

1. Pertemuan dengan acara Pengajian tentang Pendidikan Anak dalam pandangan Agama Islam.

Sambutan dari masyarakat terhadap kegiatan ini sangat baik, hal ini terlihat sejak dalam perencanaan, masyarakat terlibat aktif dalam membagi undangan ke mushola, pengumuman di pengeras suara di masjid dan mushola, serta penyiapan tempat pelaksanaan kegiatan.

Dari dialog saat berlangsungnya pengajian terlihat bahwa ibu-ibu orang tua anak yang hadir dalam pengajian itu menyadari bahwa masalah pendidikan mendapat tempat yang istimewa dalam khasanah Islam, oleh sebab itu sebagai seorang muslim sudah semestinya memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas minimal sampai jenjang SMP bagi anak-anak mereka, dan berharap bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Pendampingan KK yang memiliki anak putus sekolah.

Proses pendampingan ini berlangsung informal, berupa kunjungan ke rumah-rumah kepala keluarga yang memiliki anak putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam kunjungan ini dilakukan dialog persuasif dan berusaha menggali persepsi, mencari akar penyebab anak tidak sekolah atau putus sekolah, memberikan pandangan kepada orang tua anak dan memberikan informasi-informasi mengenai pendidikan khususnya program wajib belajar sembilan tahun.

3. Pendirian kelompok belajar masyarakat

Kelompok belajar masyarakat ini pada tahap awal kegiatan akan memprioritaskan programnya pada pemberantasan buta aksara dikalangan orang tua. Persiapan dan perencanaan kegiatan ini sudah dikonsultasikan dan diinformasikan ke pihak –pihak terkait untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini nantinya.

Kelompok belajar untuk lebih menyemangati para anak-anak usia sekolah dengan membantu anak belajar sesuai dengan tingkatan pendidikan anak-anak di Dusun Gambang, dan untuk ibu-ibu diberikan kegiatan belajar membaca Al-qur'an. Para anak-anak dan ibu-ibu dikampung ini sangat antusias dalam mengikuti kegiatan kelompok belajar, ibu-ibu juga sangat senang mengikuti kegiatan pembelajaran al qur'an dan juga ilmu-ilmu agama.

4. Pemberian alat tulis pada anak-anak TK, SD, SMP serta Al-qur'an untuk ibu-ibu

Untuk memotivasi para anak-anak usia sekolah dan membantu meringankan beban para ibu-ibu yang ditinggal oleh suami untuk bekerja di luar kota dan untuk ibu-ibu yang ekonominya sangat rendah, telah diberikan bantuan berupa alat tulis, buku bacaan anak-anak sesuai tingkatannya.

Sedangkan untuk memotivasi para ibu-ibu yang diketahui ternyata pemahaman agamanya masih sangat rendah, maka diberikan bantuan Alqur'an. Kegiatan ini sangat disambut antusias oleh ibu-ibu

untuk belajar membaca dan menulis Al-qur'an, karena kebanyakan ibu-ibu di Dusun Gaambang tidak dapat membaca Al-qur'an, dan sedikit pengetahuan tentang agama Islam.

b. Tindakan dengan Sasaran anak:

1. Kampanye "pentingnya Sekolah" dikolaborasikan dengan kegiatan lomba mewarnai tingkat sekolah dasar.
2. Pendirian Sanggar Baca kelompok "Gemar membaca"

Sanggar baca komunitas "gemar membaca" merupakan wahana pengembangan budaya belajar dengan sasaran anak secara khusus dan warga kelompok ini secara umum. Harapannya sanggar baca ini dapat menjadi medium bagi warga dalam memperoleh pengetahuan, belajar bersama, dan memutar kembali proses belajar masyarakat (reversal of learning).

3. Fasilitasi Kelompok Belajar Paket "A" dan Paket "B"

Implementasi program ini tidak dapat dilakukan pada saat penelitian PAR ini belum berjalan, karena pelaksanaan pembelajaran kelompok belajar paket B ini menurut keterangan pihak Dinas Pendidikan harus mengikuti tahun ajaran sebagaimana tahun ajaran pendidikan regular SMP.

Hal tersebut bukan masalah dalam penelitian PAR ini, betapun pelaksanaannya nanti baru dapat berjalan pada sekitar bulan Juni atau Juli 2013, yang terpenting dalam program pemberdayaan kelompok ini adalah komunitas telah memiliki kesiapan kelembagaan, dan komitmen untuk terus mendorong anak-anak di kelompok itu untuk terus sekolah.

F. Refleksi tindakan

Refleksi kegiatan selalu dilakukan setelah selesai tindakan dilaksanakan, tujuan dan refleksi ini adalah mencari dan menemukan makna baru dan pengalaman tindakan yang telah dilakukan selama proses pemberdayaan penelitian PAR, juga untuk tujuan menggali kelemahan-kelemahan dari tindakan

yang dilakukan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk tindakan-tindakan berikutnya. Proses ini dilakukan secara langsung (syclic) pada semua tindakan pemberdayaan yang dilakukan terhadap komunitas dampingan.

Temuan yang didapatkan selama proses refleksi terhadap program tindakan selama proses pemberdayaan penelitian PAR ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa latar masalah tidak terpenuhinya hak anak atas pendidikan, bukan saja tunggal disebabkan oleh kemiskinan ekonomi, tapi juga didorong oleh latar persepsi dan pandangan komunitas terhadap pendidikan anak.
2. Persepsi dan pandangan yang kontraproduktif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, lahir diantaranya karena tingkat pendidikan yang rendah, sikap fatalistis atau 'nrimo' terhadap keadaan, dan budaya eksklusif komunitas yang 'enggan' membuka diri untuk berdialog dengan kemajuan-kemajuan di luar komunitasnya.
3. Bahasa agama dalam komunitas tertentu bisa menjadi bahasa universal yang dapat dijadikan sebagai medium yang efektif untuk masuk ke ranah pikir komunitas, apalagi ketika argumen-argumen dan bahasa non agama menjadi 'barang' asing bagi komunitas itu.
4. Acara-acara resmi dan formal dalam konteks kegiatan pemberdayaan seringkali menjadi penghambat lahirnya gagasan-gagasan kreatif dari komunitas, sebab acara yang formal dan resmi menjadikan mereka asing di lingkungan mereka sendiri, sehingga yang lebih diperlukan dalam proses pemberdayaan adalah dialog informal, dalam bentuk obrolan, komunikasi dari hati ke hati, langsung di rumah mereka, di tempat mereka bekerja, dan dengan bahasa mereka sendiri.
5. Semua kegiatan, apapun bentuknya jika dikomunikasikan dengan baik, dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh komunitas, dan komunitas itu dilibatkan dalam semua proses perencanaan, maka kegiatan itu akan memperoleh dukungan yang maksimal dengan segala sumberdaya yang dimiliki oleh komunitas itu.
6. Individu dari komunitas yang tidak dilibatkan dari awal proses, cenderung menjaga jarak, dan memiliki tingkat partisipasi yang rendah terhadap kegiatan,

dibandingkan dengan individu-individu yang sejak awal proses telah dilibatkan dalam semua proses perencanaan kegiatan.

7. Beberapa keluarga yang tidak bersedia didata dipicu oleh rasa tidak peduli, keputusasaan, kejenuhan, dan tidak percaya lagi kepada program-program pemberdayaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, baik oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, menurut mereka kegiatan-kegiatan itu tidak merubah nasib dan keadaan mereka yang miskin.
8. Perubahan kelompok, baik dalam dimensi sosial ataupun ekonomi, bagi kelompok tertentu menjadi `jargon' yang sulit ditemukan wujudnya. Oleh karena itu dalam kegiatan pemberdayaankelompok, sangat penting menunjukkan kemenangan-kemenangan kecil, berupa perubahan kecil yang telah dicapai oleh komunitas. Perubahan kecil yang bisa dicapai, dapat menjadi sumber spirit dan energi bagi perubahan-perubahan yang lebih besar yang akan dilakukan di komunitas tersebut selanjutnya.
9. Anak-anak dengan segala kepolosan dan keluguannya, memiliki dunia dan persepsinya sendiri-sendiri, tapi dalam keadaan dimana segala sesuatunya masih dalam kontrol orang tua, anak menjadi sangat *dependent* (tergantung) dengan persepsi dan paradigma orang tuanya. Keinginan anak untuk sekolah misalnya; tidak serta merta dapat dilaksanakan ketika orang tua berpandangan bahwa sekolah bukan merupakan hal yang penting dan layak untuk diperjuangkan. Dalam konteks kegiatan pemberdayaan ini, menjadi sangat penting untuk mempertemukan pandangan orang tua dan anak dalam bentuk kegiatan pemberdayaan yang terintegrasi.

V.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis temuan penelitian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelompok perempuan dan anak-anak Dusun Gambang, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali merupakan kelompok

masyarakat yang tidak berdaya dari sisi ekonomi, komunitas miskin pedesaan, dengan mata pencarian (*livelihoods*) 55% (buruh tani), 28% (petani), dan sisanya 17% (buruh perkotaan). Rata-rata memiliki penghasilan Rp. 300 ribu — Rp. 400 ribu per bulan (74% - mayoritas), Rp. 600 ribu- Rp. 1 Juta (24%), dan yang berpenghasilan Rp. 1 juta lebih (2%).

2. Sebagai kelompok dengan ketidakberdayaan ekonomi, kelompok ini memiliki motivasi dan tingkat pemenuhan hak anak yang terbatas terhadap pendidikan dasar Tercatat 48% anak yang tidak sekolah mengaku putus sekolah karena tidak ada biaya, 22% karena harus bekerja, membantu ekonomi keluarga 29%, karena jarak sekolah yang jauh 1%
3. Sebagian besar anak yang masih sekolah, kondisinya juga dalam keadaan yang rentan (berpotensi) untuk putus sekolah, berdasarkan pengakuan orang tuanya tercatat 63% anak biaya sekolahnya tersendat, dan nyaris putus sekolah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan biaya sekolah, hanya 37% yang menyatakan biaya sekolahnya lancar dan tidak ada kendala.
4. Dari kajian eksplorasi terhadap pandangan komunitas terhadap pendidikan, ditemukan juga bahwa rendahnya pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar disebabkan juga oleh latar kultur, bahwa sekolah hanya untuk laki yang bertugas mencari nafkah, sedangkan perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi, karena hanya mengurus rumah tangga.
5. Tindakan pemberdayaan kepada orang tua dalam penelitian ini memperoleh sambutan dan partisipasi yang baik dari warga, dari proses tersebut warga menyampaikan penghargaan, dan merasa terbuka wawasannya terhadap pentingnya pemenuhan hak anak alas pendidikan.
6. Baiknya sambutan dan partisipasi warga tersebut, tidak serta merta dapat diartikan bahwa tindakan pemberdayaan yang dilakukan dalam penelitian ini telah berhasil merubah persepsi dan pandangan komunitas yang bersifat paradigmatik, sebab merubah pandangan disadari memerlukan waktu yang cukup lama, dan membutuhkan tahapan kegiatan yang tidak sedikit.
7. Sebagai sebuah proses pemberdayaan, tindakan yang dilakukan dalam

penelitian ini tidak dimaksudkan untuk sebuah capaian jangka pendek yang secara instan dapat segera dilihat hasilnya, tapi merupakan usaha rintisan dan upaya memberikan stimulus, agar komunitas terbangun kapasitas, prakarsa dan kreatifitasnya, untuk kemudian secara mandiri mencari solusi untuk dapat keluar dari persoalan-persoalan yang membelenggu komunitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mahmudi. *Tinjauan Umum Participatory Action Research*. Makalah Workshop Nasional PAR tanggal 21 s.d 26 September 2002 di Tawangmangu.
- Anonim. 2009. *Teori Peran* (Online): Tersedia: <http://konsultasikehidupan.wordpress.com/2009/05/07/teori-peran-role-theory/>.
- Burke, Edmund M. 2004. *Sebuah Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota (Terjemahan A Participatory Approach to Urban Planning)*. Bandung : Penerbit Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Buku 1)*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2001. *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Depdikbud.
- Hayunieta. 2007. *Perempuan dan Pembangunan: Marjinalisasi Ritzer George, Douglas*
- J.Goodman.2004.*Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Kusnaka Adimiharja, dan Hary Hikmat. 2003. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat*. Penerbit Humaniora. Bandung.
- Miles, Matthew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. (Terjemahan *Qualitative Data Analysis* oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Saptari Ratna.1997. *Perempuan kerja dan perubahan sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sastropoetro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunitas, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. PT. Alumni. Bandung.

- Sherraden, Michael. 2006. *Aset Untuk Orang Miskin : Perspektif Usaha Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Penganatar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudantoko, Djoko dan Hamdani, Muliawan. 2009. *Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan*. PT. PP. Mardi Mulya. Jakarta.
- Suparlan, Suyatno Hempri. 2003. *Pembangunan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Aditya Media: Yogyakarta.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. P.T. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suyanto. 2013. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Syaefudin, dkk. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1985. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terjemahan oleh Abdullah Burhanudin. Jilid I. Edisi Ketiga. Jakarta.
- Umaedi. 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdikbud.
- Undang-Undang No. 11, No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (Konvenan Intemasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- UNDP. 2011. *Human Development Index (HDI)*. www.undp.or.id/. Unduh 28 Agustus 2012.
- Unesco. 2010. *EFA Global Monitoring Report*. <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/statis-tics/>. Unduh 28 Agustus 2012.
- United Nation. 2000. *International Convenant on Economic, Social, and Cultural Right*. Diakses melalui www.un.org/millennium/law/iv-3.htm pada tanggal 10 September 2010.
- Usman Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

World Bank, 2006. *Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Gradasi Aksara. Jakarta.